

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab II penelitian ini, diuraikan tentang pengertian puisi secara umum beserta unsur-unsur pembangun puisi, landasan teori penelitian berupa semiotika Michael Riffaterre dan pendekatan historis Hippolyte A. Taine, dinamika konstitusi politik dan militer Jepang, keterlibatan Jepang dalam perang yang tercermin dalam puisi *Hiroshima to Iu Toki* dan puisi *Nan no Tame ni Tatakatta no ka* karya Sadako Kurihara, serta biografi penyair. Hal itu diuraikan satu per satu pada bagian berikut.

#### **2.1 Puisi**

Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat dan padat yang dituangkan dari isi hati, pikiran dan perasaan penyair. Puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, kemudian diubah dalam wujud yang paling berkesan. Bahasa puisi banyak mengandung ambiguitas, memungkinkan memiliki lebih dari satu makna dan juga memiliki sifat estetis. Kata-kata tersebut menjadi suatu sistem tanda yang mengungkapkan imaji penyairnya. Puisi sebagai karya sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspek, misalnya struktur dan unsur-unsurnya, bahwa puisi merupakan struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuhitan (Pradopo, 2009:3-7). Kepuitisan itu sendiri mengandung keindahan yang khusus untuk puisi. Karya sastra dapat dikatakan puitis jika karya tersebut mampu membangkitkan perasaan, menarik perhatian, dan menimbulkan tanggapan yang jelas. Sementara itu, pengertian puisi menurut Waluyo (dalam Suwarni, 2011:5), adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan unsur batinnya. Menurut Riffaterre (dalam Pradopo, 2009:3), puisi selalu mengalami perkembangan dari dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, pengertian puisi pun dari waktu ke waktu selalu berubah meskipun hakikatnya tetap sama. Perubahan pengertian itu disebabkan puisi selalu berkembang karena perubahan konsep keindahan dan evolusi selera.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan bentuk rangkaian hasil pikiran dan perasaan atau karya imajinatif seorang penyair yang dikemas dalam bahasa yang padat, indah, dan terstruktur, sehingga dapat membangkitkan perasaan, panca indera, dan merangsang imajinasi lewat penataan bunyi, irama, dan makna untuk memberi kesan keindahan kepada pembaca.

### **2.1.1 Unsur – Unsur Puisi**

Pengertian puisi juga harus dipahami melalui unsur-unsur pembentuk yang menjadikan suatu karya menjadi puisi. Secara garis besar, unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua macam, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Hartoko (dalam Suwarni, 2011:6-7) menyebut adanya unsur penting dalam puisi, yaitu unsur tematik atau unsur semantik puisi dan unsur sintaksis puisi. Unsur tematik puisi lebih menunjuk ke arah struktur batin puisi, unsur sintaksis menunjuk ke arah struktur fisik puisi. Maka dijelaskan macam-macam struktur fisik dan batin puisi menurut Altenbernd (dalam Pradopo, 2009:13) sebagai berikut.

#### **1. Struktur Fisik Puisi**

Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, bahasa figuratif, kata konkret, tipografi dan rima atau ritme.

##### **a. Tipografi (Perwajahan Puisi)**

Tipografi adalah bentuk visual puisi yang berupa tata huruf dan tata baris dalam karya puisi. Tipografi berisi bentuk format suatu puisi, seperti tatanan larik, bait, kalimat, frase, kata dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa dan suasana. Unsur tersebut merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan bentuk karya sastra lain seperti prosa dan drama. Kumpulan baris kalimat pada puisi yang disebut larik puisi tidak membentuk paragraf melainkan bait. Dalam membuat sebuah puisi, tiap penyair memiliki ciri khas tipografi tersendiri yang menjadi pembeda antar tiap penyair. Fungsi utama dari tipografi adalah membuat teks agar mudah untuk digunakan. Tipografi merujuk pada kemudahan dalam membaca teks (*readability*) dan

kemudahan dalam mengenali setiap huruf dan kata (*legibility*) (Pradopo, 2009:177). Tipografi berguna untuk menghidupkan teks dalam sebuah tulisan, membuat lebih menarik sehingga pembaca penasaran dan ingin membaca keseluruhan teks. Oleh karena itu, unsur pembangun ini sangat berpengaruh dalam pemaknaan dari isi puisi itu sendiri.

### **b. Diksi**

Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Pada umumnya, diksi paling sering ditemukan dalam puisi yang berfungsi untuk memperindah dan memperdalam makna puisi. Pemilihan diksi atau uraian kata pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Menurut Pradopo (2009:54), diksi adalah pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai, serta tepat dalam situasi. Dengan penggunaan diksi yang tepat dan selaras, seorang penyair dapat mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Diksi membuat pembaca dapat mengerti tentang karakter penyair hanya dengan pilihan kata-kata yang digunakannya dalam sebuah puisi dan dapat menjadi pembeda antara penyair satu dengan yang lainnya. Penyair sering kali menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, yaitu kata yang memiliki banyak arti atau mengandung makna luas, dan ada pula yang ber lambang.

### **c. Imaji**

Imaji dapat disebut sebagai citraan, yaitu gambar-gambar pikiran. Imaji merupakan gambaran-gambaran angan dalam puisi yang ditimbulkan melalui kata-kata. Penyair menggunakan imaji untuk menimbulkan suasana yang khusus. Dalam puisi, imaji memberikan sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai (gambaran) yang dihasilkan oleh penangkapan pembaca terhadap suatu objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang bersangkutan (Pradopo, 2009:79). Menurut Altenbernd (dalam Pradopo, 2009:80), Pembaca diharapkan dapat mengingat sebuah pengalaman indera atas objek-objek yang disebutkan atau diterangkan dalam puisi. Tanpa itu, maka perumpamaan yang digunakan oleh penyair dalam puisi tidak akan menghidupkan gambaran.

#### **d. Kata Konkret**

Kata konkret merupakan kata yang ditangkap dengan indra dan memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konkret berarti nyata, benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya). Menurut Pradopo (2009), kata konkret merupakan kata yang dapat menyarankan kepada arti yang menyeluruh, sehingga pembaca dapat membayangkan peristiwa atau keadaan secara jelas, maupun sesuatu yang digambarkan oleh penyair. Misal kata konkret “salju” melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain.

#### **e. Bahasa Figuratif (Majas)**

Penyair menggunakan bahasa yang memiliki makna kiasan atau makna perumpamaan sehingga disebut dengan bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan perasaan, pengalaman batin, suasana hati, ataupun semangat hidupnya. Adanya bahasa kiasan ini menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan (Pradopo, 2009:62). Maka, dapat disimpulkan bahwa bahasa figuratif mempertalikan suatu hal dengan cara menghubungkannya dengan suatu hal lainnya agar dapat digambarkan dengan lebih jelas. Puisi dianggap sebagai sarana atau alat yang digunakan oleh penyair dalam mengungkapkan suatu hal.

#### **f. Rima atau Ritme**

Rima merupakan pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa secara teratur. Penyair dalam puisi, mempertimbangkan pemilihan bunyi-bunyi yang mendukung perasaan dan suasana puisi untuk membentuk musikalisasi dan orkestrasi, misalnya sajak akhir, ulangan-ulangan kata, dan ulangan-ulangan bait (Pradopo, 2009:41-42). Dengan adanya rima, selain membuat puisi terdengar lebih merdu dan mudah dibaca, puisi juga dapat mengalirkan perasaan ataupun pikiran penyair sehingga menimbulkan bayangan angan (imaji-imaji) yang jelas dan hidup. Rima juga menimbulkan adanya pesona yang melibatkan para pembaca atau pendengar ke dalam keadaan *extase*

(bersatu diri dengan objeknya) sehingga menyebabkan sajak yang dikemukakan dalam puisi meresap dalam hati dan jiwa si pembaca atau pendengar.

## **2. Struktur Batin Puisi**

Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak dapat dilihat dan diamati secara langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi terdiri dari tema, perasaan penyair, nada atau suasana puisi, dan amanat.

### **a. Tema**

Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya yang bersifat khusus (diacu dari penyair), objektif (semua pembaca harus menafsirkan sama), dan lugas atau bukan makna kias yang diambil dari konotasinya. Tema dapat berupa responsi penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya yang diungkapkan melalui penggambaran suasana batin (Waluyo dalam Pratama, 2017). Dalam hal ini, puisi berperan sebagai sarana protes atau ungkapan keprihatinan penyair terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Maka dari itu, pembaca sedikit banyak harus mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah dalam menafsirkan suatu puisi.

### **b. Perasaan Penyair**

Puisi mengungkapkan perasaan penyair terhadap inti permasalahan yang berada di dalam puisi. Perasaan penyair merupakan nuansa batin penyair yang diungkapkan dengan penuh penghayatan dan takaran yang tepat, sehingga puisi yang diciptakan oleh penyair terasa lebih hidup, menyentuh hati, dan menggetarkan. Perasaan tersebut ikut dirasakan dan dapat dihayati oleh pembaca. Herman J. Waluyo (dalam Pratama, 2017) menyatakan bahwa perasaan yang menjiwai puisi dapat berupa perasaan gembira, sedih, terharu, terasing, kesepian, tersinggung, takut, sombong, cemburu, menyesal, dan lain sebagainya.

### **c. Nada dan Suasana**

Puisi mengungkapkan nada dan suasana kejiwaan. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca, dan suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca suatu puisi akibat psikologis yang dihasilkan puisi tersebut terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan satu sama lain karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya (Waluyo dalam Pratama,

2017). Ada puisi yang bernada sinis, protes, memberontak, patriotik, mencekam, humor, filosofis, dan lain sebagainya. Misal puisi bernada kritik yang diberikan penyair mampu menimbulkan suasana penuh pemberontakan bagi pembaca.

#### **d. Amanat**

Amanat merupakan kesan yang ditangkap oleh pembaca setelah membaca suatu puisi. Sikap dan pengalaman pembaca sangat berpengaruh terhadap amanat puisi. Amanat atau nasihat yang akan disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah tema, rasa, dan nada puisi dipahami. Pembaca menggunakan cara pandangnya dalam menyimpulkan amanat puisi. Meskipun demikian, amanat tidak terlepas dari tema dan isi puisi yang dikemukakan oleh penyair (Waluyo dalam Pratama, 2017).

## **2.2 Teori Semiotika Michael Riffaterre**

Semiotika merupakan ilmu mengenai penafsiran tanda. Tanda memiliki dua aspek, yaitu penanda (*signifié, signifiant*) dan petanda (*signified, signifié*). Penanda merupakan bentuk formal dari tanda itu sendiri, dalam bahasa berupa satuan bunyi, atau huruf dalam sastra tulis. Sedangkan, petanda (*signified*) merupakan arti atau makna dari apa yang ditandai oleh penanda tersebut (Pradopo, 1999:76).

Pada dasarnya karya sastra merupakan karya seni yang bermedium bahasa. Menganalisis karya sastra dengan semiotika merupakan usaha untuk memaknai karya sastra dengan mencari tanda-tanda penting yang memungkinkan menimbulkan makna. Menurut Preminger (dalam Pradopo, 1999:77), terdapat dua sistem semiotika, yaitu sistem semiotika tingkat pertama (*first order semiotics*), dan sistem semiotika tingkat kedua (*second order semiotics*). Sebelum menjadi karya sastra, bahasa sudah merupakan tanda yang memiliki arti (*meaning*). Oleh karena itu, bahasa disebut sebagai sistem semiotika tingkat pertama yang kemudian menjadi tanda sastra, ditingkatkan kembali menjadi sistem semiotika tingkat kedua. Arti bahasa menjadi arti sastra, makna arti sastra ini disebut *significance*.

Bahasa pada puisi tidak terlepas dari sifat denotatif (makna sebenarnya atau dalam kamus) dan sifat konotatif (makna kias). Sifat konotatif yang terdapat dalam puisi sering kali menimbulkan kesulitan bagi pembaca untuk memahami makna dari puisi tersebut. Agar dapat memaknai puisi dengan baik, maka puisi harus

dianalisis dengan tataran semiotika, sebab puisi merupakan sistem tanda-tanda yang memiliki makna. Salah satu tokoh terkenal dengan teori semiotika puisi, yaitu Michael Riffaterre.

Riffaterre (dalam Pradopo, 1999:77) mengemukakan bahwa puisi selalu berubah oleh konsep estetika dan mengalami evolusi selera sesuai perkembangan zaman. Puisi menyampaikan pesan secara tidak langsung, sebab puisi memiliki satuan-satuan tanda yang memiliki makna berdasarkan konvensi-konvensi sastra. Menurut Riffaterre, terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan dalam sastra, yaitu (1) pembacaan heuristik dan pembacaan retroaktif atau hermeneutik, (2) puisi itu ekspresi tidak langsung, menyatakan suatu hal dengan arti yang lain, (3) matriks, model, dan varian-varian, (4) hipogram. Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan teknik pembacaan heuristik, dan pembacaan retroaktif atau hermeneutik untuk mengetahui makna yang terkandung dalam puisi *Hiroshima to Iu Toki* dan puisi *Nan no Tame ni Tatakatta no ka* karya Sadako Kurihara.

### **1. Pembacaan Heuristik**

Pertama kali, sajak dibaca secara heuristik, yaitu dibaca berdasarkan tata bahasa normatif, morfologi, semantik, dan sintaksis. Karya sastra seperti puisi ditulis secara sugestif, hubungan antarbaris dan baitnya bersifat implisit. Hal ini disebabkan karena puisi hanya mengekspresikan inti gagasan atau pikiran (Pradopo, 1999:80). Pembacaan heuristik menghasilkan arti (*meaning*) sajak secara keseluruhan menurut tata bahasa normatif sesuai dengan sistem semiotik tingkat pertama (*first order semiotics*). Pembacaan ini didasarkan pada konvensi bahasa karena bahasa memiliki arti referensial, pembaca harus memiliki kompetensi linguistik agar dapat menangkap arti (*meaning*). Arti (*meaning*) merupakan semua informasi yang disajikan oleh teks kepada pembaca yang bersifat tekstual dan bersifat referensial sesuai dengan bahasa. Kompetensi linguistik yang dimiliki oleh pembaca berfungsi sebagai sarana dalam memahami beberapa hal yang disebut sebagai ungramatikal (ketidakgramatikalitasan teks).

Menurut Riffaterre (dalam Pradopo, 1999:80), bahasa sastra harus dinaturalisasikan menjadi bahasa biasa (bahasa normatif). Dalam penaturalisasian

ini, kata-kata yang tidak berawalan dan berakhiran akan diberi awalan dan akhiran. Dapat pula ditambahkan kata atau kalimat untuk memperjelas hubungan antarkalimat dan antar baitnya. Susunannya diubah menjadi susunan tata bahasa normatif, baik kata maupun kalimatnya dapat diganti dengan sinonimnya atau yang searti. Pembacaan heuristik belum memberikan makna sajak atau makna sastra (*significance*), sebab pembacaan heuristik baru memberikan arti sajak berdasarkan konvensi bahasanya sebagai sistem semiotik tingkat pertama. Oleh karena itu, karya sastra harus dibaca ulang (retroaktif) dengan memberikan tafsiran (hermeneutik) berdasarkan konvensi sastra yang merupakan sistem semiotik tingkat kedua.

## **2. Pembacaan Hermeneutik**

Pembacaan retroaktif atau hermeneutik dilakukan setelah pembacaan heuristik dan merupakan pembacaan menurut sistem semiotik tingkat kedua (*second order semiotics*). Menurut Riffaterre (dalam Pradopo, 1999:81), pembacaan hermeneutik dilakukan secara berulang-ulang untuk memperoleh daya interpretasi yang baik dalam mengungkapkan makna puisi. Maksud dari berulang-ulang adalah saat membaca satuan makna puisi dalam satu bait atau satu baris, pembaca akan mengkaitkan, merevisi, dan mengulas kembali satuan makna tersebut dengan pengalaman membaca sebelumnya. Pada tahap pembacaan hermeneutik, puisi dimaknai secara keseluruhan yang mana akan terlihat hal-hal yang semula tidak gramatikal menjadi himpunan kata-kata yang ekuivalen. Tanda-tanda yang ditemukan pada tahap pembacaan heuristik akan ditemukan makna sebenarnya.

### **2.3 Pendekatan Historis Hippolyte A. Taine**

Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) merupakan seorang filsuf, psikolog, kritikus, dan sejarawan kebangsaan Prancis yang mengemukakan bahwa pendekatan historis digunakan untuk mempertimbangkan karya sastra melalui teori tentang ras (etnik dan genetik), lingkungan (hal-hal yang berkaitan dengan wilayah tempat tinggal), dan momentum (peristiwa besar yang terjadi pada saat itu). Karya sastra dianggap sebagai kritik terhadap kehidupan karena mencerminkan masyarakat, manusia, dan waktu di mana karya sastra tersebut dibuat atau diterbitkan. Dengan mempelajari dokumen-dokumen karya sastra, seseorang dapat memahami psikologi penyairnya yang dilengkapi dengan pengamatan terhadap



fakta-fakta kehidupan dan kepribadian penyair. Dalam mengetahui kehidupan penyair sepenuhnya, tidak hanya sisi terang kehidupan, melainkan juga sisi gelap dan kelam kehidupan penyair perlu untuk diketahui. Dengan demikian, penyair menciptakan karya sastra yang dapat digambarkan sebagai representatif dan ekspresi dari suatu zaman dan masyarakat.

Menurut Hippolyte, mempelajari pengalaman masa lalu dalam karya sastra merupakan pelajaran yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah. Apabila suatu karya sastra mengungkapkan simpati sosial, tentu saja hal itu pasti akan memberi pengaruh positif pada pikiran dan sikap pembaca. Pembaca bereaksi terhadap karya sastra dengan mengikuti pesan dan motivasi yang diberikan karya sastra (Charlton, 2022). Pendekatan historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan yang tepat.

Pengumpulan bukti – bukti atau data dilaksanakan secara sistematis sehingga mampu menggambarkan dan memahami peristiwa di masa lampau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis karena permasalahan yang diangkat berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu peristiwa keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II tahun 1939-1945 dan Perang Teluk II tahun 1990-1991. Pada pendekatan historis terdapat langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Langkah pertama adalah heuristik, yaitu kegiatan pencarian dan pengumpulan data atau fakta. Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan beberapa sumber data yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam puisi. Sumber-sumber tersebut berasal dari sumber buku, jurnal, artikel, maupun sumber lainnya yang didapatkan dari hasil pencarian di internet.

Langkah kedua adalah melakukan kritik sumber yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan terkait data dan fakta yang telah diperoleh. Data-data yang telah ditemukan harus sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam puisi, hal

ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mencari jawaban dari permasalahan penelitian.

Langkah ketiga adalah penafsiran atau interpretasi. Setelah melewati kedua tahapan di atas, penulis melakukan penafsiran dan menyusun makna kata-kata yang disesuaikan dengan fakta atau data yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga didapatkan gambaran yang jelas terkait fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas dalam mengetahui persepsi Sadako Kurihara terkait keterlibatan Jepang dalam perang pada puisi *Hiroshima to Iu Toki* dan puisi *Nan no Tame ni Tatakatta no ka*. Proses interpretasi dalam penelitian ini, penulis lakukan secara objektif sehingga hasil dari penelitian tidak memiliki kecenderungan untuk memihak pihak manapun yang terkait. Selain itu, tahapan penafsiran ini dilakukan dengan mengolah beberapa fakta yang telah dikritisi dan merujuk pada beberapa referensi yang digunakan untuk memproses puisi yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **2.4 Dinamika Konstitusi Politik dan Militer Jepang**

Sebuah hukum dasar negara mengandung berbagai prinsip atau merupakan sebuah peraturan utama dari suatu pemerintahan yang didirikan dengan adanya bantuan dari organisasi atau hal-hal dasar lainnya. Konstitusi sangat diperlukan untuk meningkatkan hukum dan peraturan untuk negara, serta konstitusi didirikan untuk meletakkan tujuan nasional yang membentuk bangunan dasar yang menjadi sandaran negara, seperti urusan terkait pembatasan kekuasaan dan mewujudkan aturan organisasi politik atau militer (Tika, 2018). Namun, dalam perkembangannya, konstitusi sebuah negara dapat mengalami perubahan, sebab konstitusi yang telah dibuat tidak lagi menjadi hal yang relevan terhadap sebuah kepentingan rakyat dan bangsa atau konstitusi tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan sebuah bangsa dan negara tersebut. Salah satu negara yang melakukan amandemen pada konstitusi negaranya adalah Jepang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan hukum dasar negara Jepang yang mengatur kekuasaan politik dan militer Jepang pascaperang. Maka dari itu, berikut merupakan perkembangan dari reformasi struktur politik dan militer negara Jepang.

### 2.4.1 Politik dan Militer Jepang Periode Meiji

Konstitusi Meiji merupakan hukum dasar negara Jepang yang paling awal. Setelah Restorasi Meiji (1868), Konstitusi Meiji dibentuk pada 11 Februari 1889, namun baru mulai diberlakukan pada 29 November 1890. Konstitusi ini secara umum menempatkan Kaisar Jepang sebagai penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar. Restorasi Meiji dimulai dengan mengembalikan kekuasaan politik secara langsung kepada kaisar. Hal ini menandai titik awal reformasi Jepang dalam bidang sosial dan politik, serta proses keterbukaan Jepang terhadap dunia luar dan westernisasi yang bertujuan untuk mengangkat kedudukan Jepang agar sejajar dengan negara-negara lain di dunia Barat. Jepang mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat dengan semangat *fukoku kyouhei* yang berarti “negara kaya, militer kuat” (Obispo, 2017).

Meskipun Konstitusi Meiji telah diberlakukan di Jepang. Namun, pada tahun 1947, Konstitusi Meiji berakhir sebagai salah satu dampak dari kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan undang-undang yang berlaku di Jepang yaitu Konstitusi Meiji menjadi Konstitusi baru yang dikenal dengan Konstitusi 1947 yang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947.

### 2.4.2 Konstitusi 1947

Konstitusi 1947 merupakan hukum dasar negara baru Jepang pasca Perang Dunia II yang terdiri dari 103 pasal. Konstitusi ini mulai diundangkan pada 3 November 1946 dan diresmikan pada 3 Mei 1947. Konstitusi ini direncanakan sebagai pengganti sistem pemerintahan yang militeristik menjadi demokrasi liberal (Uera, 2015). Konstitusi 1947 berpedoman pada beberapa hal yang cukup dasar seperti kedaulatan rakyat, penghormatan HAM, dan penolakan terhadap segala bentuk perang dan kekerasan. Hal ini mengakibatkan Jepang memiliki sedikit keabsenan pada komponen kekuatan dalam suatu negara, yakni dalam bidang militer. Keabsenan ini biasa dikenal dengan pasifisme. Pasifisme sendiri berasal dari bahasa Latin *paci-* yang berarti ‘perdamaian’ dan *-ficus* yang berarti ‘membuat’ (Ramadhani, 2020). Isi dari Konstitusi 1947 yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah sebagai berikut.

“Kami bangsa Jepang, yang bertindak melalui perwakilan kami yang terpilih di Parlemen Nasional menetapkan bahwa kami akan mengamankan untuk diri kami sendiri dan keturunan kami sebagai buah kerjasama yang damai dengan semua bangsa dan karena kebebasan di seluruh negeri ini memutuskan bahwa kami tidak boleh merasakan penderitaan akibat perang lagi melalui tindakan pemerintah, dan menyatakan kuasa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kami (masyarakat Jepang), menolak dan mencabut semua bentuk konstitusi, hukum, tata cara, dan rescripts dalam konflik yang berlaku sebelumnya melalui pernyataan ini.”

“Kami bangsa Jepang, menginginkan perdamaian untuk semua waktu dan sangat sadar akan cita-cita tinggi mengendalikan hubungan manusia, serta kami harus bertekad untuk menjaga keamanan dan eksistensi, yakin pada keadilan dan iman bangsa-bangsa yang mencintai perdamaian dunia. Kami berkeinginan untuk menempati tempat terhormat dalam masyarakat internasional serta berjuang untuk pelestarian perdamaian, serta pemusnahan terhadap tirani, perbudakan, penindasan, dan intoleransi untuk semua masa di bumi. Kami menyadari bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama untuk hidup dalam perdamaian, serta bebas dari rasa takut. Kami yakin bahwa tidak ada bangsa yang hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, namun hukum moralitas politik bersifat universal, dan bahwa ketaatan pada hukum tersebut merupakan kewajiban atas semua bangsa yang akan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dan membenarkan hubungan kedaulatan mereka dengan bangsa lainnya. Kami rakyat Jepang, menggadaikan kehormatan nasional untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita luhur dengan semua sumber daya yang kami miliki.” (Damartyas, 2018).

### 2.4.3 Konstitusi Jepang Pasal 9

Konstitusi Jepang Pasal 9 mulai diberlakukan sejak 3 Mei 1947 menyusul menyerahnya Jepang kepada sekutu dalam Perang Dunia II, merupakan suatu klausul yang dikenal dengan *the peace clause* yang melarang Jepang untuk berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan perang, baik dilakukan oleh negara maupun mendukung negara lain. Konstitusi ini dibuat oleh Amerika Serikat sebagai negara pemenang Perang Dunia II, untuk melucuti semua kapasitas militer Jepang. Jepang dilarang untuk memiliki kekuatan militer yang *offensive*, dan mewajibkan Jepang menggunakan kebijakan pasifisme, yakni paham yang menentang adanya perang atau paham yang mencintai perdamaian (Yuzuru, 2011).

Konstitusi Jepang Pasal 9 dibentuk karena Jepang menganut paham imperialis sehingga melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah negara tetangganya di Asia Tenggara pada zaman Kekaisaran Meiji sebelum Perang Dunia I sampai Perang Dunia II. Pada sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dapat diketahui bahwa paham militerisme yang dianut oleh pihak-pihak elit Jepang tersebut mengakibatkan Jepang mengekspansi China pada tahun 1894 hingga 1895 (Perang Dunia I), dan Jepang mengekspansi China kembali pada tahun 1937 hingga 1945 (Perang Dunia II). Pada tahun 1941, Jepang yang pertama kali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, sehingga hal tersebut yang mengakibatkan Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu (Butowsky, 2018).

Sejarah dibentuknya Konstitusi Jepang Pasal 9 diawali pada 15 Agustus 1945, yakni setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jepang mengalami kekalahan oleh negara adidaya Amerika Serikat bersama dengan negara-negara sekutunya. Kekalahan tersebut mengakibatkan Jepang menjadi terpuruk karena pusat kota perekonomiannya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada waktu itu diluluh lantakkan oleh Amerika Serikat menggunakan bom Atom. Hiroshima diserang melalui udara dengan menggunakan bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki juga diserang pada 9 Agustus 1945. Akibat kekalahan Jepang tersebut, Jepang melakukan tindakan untuk menyerah tanpa syarat terhadap Amerika Serikat pada 2 September 1945 dan hal tersebut menyatakan berakhirnya Perang Dunia II (Butowsky, 2018). Sejak saat itu, Amerika Serikat mulai turut campur dalam urusan domestik di negara Jepang. Amerika Serikat beranggapan bahwa tidak ada yang membatasi pihak-pihak elit, seperti pihak pemerintahan, Jenderal, Laksamana, para diplomat dan para birokrat. Maka, hal tersebut menyebabkan Jepang memiliki paham militerisme (Yuzuru, 2011).

Selama masa pendudukan Amerika Serikat di Jepang, Amerika Serikat meminta Jepang untuk menyusun hukum dasar negara baru yang berisikan dasar-dasar demokrasi, HAM dan perdamaian. Kemudian pada tahun 1947, Konstitusi tersebut ditetapkan. Konstitusi baru tersebut menyatakan bahwa kaisar sebagai simbol untuk menyatukan atau pemersatu warga Jepang (*Weak*

*Constitutional Monarchy*), membatasi kekuatan militer dan tidak adanya perang (pasifisme), serta rakyat yang berdaulat dan damai (Kimijima, 2009). Dengan adanya konstitusi ini, negara Jepang yang tadinya bersifat ekspansionis-imperialis, beralih menjadi negara yang pasif yang selalu menekankan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Berikut adalah dua ayat yang terdapat pada Konstitusi Jepang Pasal 9 mengenai penolakan perang.

(1) 第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(1) *Daikyūjyō nihon kokumin wa, seigi to chitsujyō wo kichō to suru kokusaiheiwa wo seijitsu ni kikyūshi, kokken no hatsudōtaru sensō to, buryoku ni yoru ikaku mata wa buryoku no kōshi wa, kokusaibunsō wo kaiketsu suru shudan toshite wa, eikyū ni kore wo hōki suru.* (2) *Zenkō no mokuteki wo tatsu suru tame, rikukaikūgun sono ta no senryoku wa, kore wo hoji shinai. koku no kōsenken wa, kore wo mitomenai.*

(1) Kami bangsa Jepang bercita-cita tulus untuk mewujudkan perdamaian internasional yang didasarkan pada keadilan dan ketertiban, bangsa Jepang untuk selama-lamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana penyelesaian perselisihan internasional. (2) Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, serta potensi perang lainnya tidak akan pernah dipertahankan. Hak berperang negara tidak akan diakui.

*(Japan Institute of Constitutional Law, 2004)*

Ayat pertama pada Konstitusi Jepang Pasal 9 menjelaskan bahwa Jepang memiliki cita-cita untuk mewujudkan perdamaian internasional dan berkomitmen untuk meninggalkan segala bentuk peperangan yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Hal ini dilanjutkan dengan ayat kedua yang menjelaskan bahwa Jepang harus menghilangkan kekuatan angkatan bersenjata mulai dari darat, laut, udara, dan potensi perang lainnya. Hak negara untuk menyatakan perang tidak diakui dalam Konstitusi Jepang Pasal 9. Dengan adanya ayat 1 dan 2 dalam Konstitusi Jepang

Pasal 9, maka secara konstitusional, Jepang tidak memperbolehkan adanya keberadaan, pengaturan serta penggunaan pasukan militer. Namun pada kenyataannya, Jepang masih memiliki kekuatan militer.

#### **2.4.4 Implementasi dan Kontroversi Pasal 9**

Isu keamanan internasional menjadi perhatian pemerintah Jepang pada era Shinzo Abe, namun kapasitas Jepang untuk membangun kekuatan militernya dikekang oleh Konstitusi Jepang Pasal 9 yang melarang Jepang untuk menggunakan kekuatan militernya dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Sebagai gantinya, konstitusi hanya mengizinkan dibentuknya *Japan Self Defense Force* (JSDF), meski pasal ini tidak memperbolehkan pasukan bela diri digunakan untuk tujuan agresi militer dan hanya sebatas untuk tujuan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah teritorial Jepang. Menurut Oros (dalam Ramadhani, 2020), pada periode awal pasca Perang Dunia II bahwa identitas keamanan Jepang pascaperang dijelaskan oleh tiga prinsip utama: (1) Jepang tidak akan memiliki angkatan bersenjata tradisional; (2) Jepang tidak akan menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri; dan (3) Jepang tidak akan berpartisipasi dalam perang asing.

Ambiguitas pada eksistensi JSDF telah menimbulkan kontroversi dalam negeri. Kontroversi terjadi antara kelompok yang memandang bahwa Konstitusi Jepang Pasal 9 memerlukan amandemen dengan kelompok yang menganggap bahwa Konstitusi Jepang Pasal 9 harus dipertahankan. Namun, tampaknya pemerintah Jepang telah menuju pada perluasan pergerakan JSDF, yang mana hal ini tidak sejalan dengan makna pasifisme itu sendiri. Hal ini disebabkan karena sistem internasional pada masa kontemporer tidak lagi sama dengan sistem internasional pasca Perang Dunia II (Nomura dalam Ramadhani, 2020). Maka dari itu, pada tahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa proses reinterpretasi Konstitusi Jepang Pasal 9 sedang dibahas dalam parlemen yang untuk pertama kalinya akan mengizinkan Jepang untuk mengerahkan militernya jika sekutu membutuhkan. Mendengar hal ini, Amerika Serikat tidak terlalu terkejut, sebab sebenarnya mereka telah beberapa kali menginginkan keterlibatan militer Jepang untuk membantu Amerika Serikat dalam perang

sejak Perang Dingin (Richter dalam Damartyas, 2018). Namun, keputusan ini dikritik oleh partai-partai politik, rakyat Jepang, serta para akademisi dan ahli hukum negara, sehingga sempat menimbulkan keresahan dan perdebatan di dunia internasional karena khawatir jika keputusan untuk mengreinterpretasi Konstitusi Jepang Pasal 9 akan membangkitkan sifat agresif Jepang sama seperti pada waktu terjadinya Perang Dunia II, dimana Jepang dapat dikatakan hampir menguasai seluruh Asia Timur. Sebenarnya, niat Jepang untuk mengreinterpretasi Konstitusi Jepang Pasal 9 ini telah diinginkan oleh Perdana Menteri Jepang Toshiaki Kaifu pada tahun 1990, seiring dengan meletusnya Perang Teluk (Nasu, 2009).

Jepang berusaha untuk selalu mengutamakan negosiasi dalam penyelesaian konflik dan sengketa, sebab Jepang tidak dapat bertindak lebih dari itu karena dibatasi oleh aturan *the peace clause* dalam Pasal 9. Sebagai negara yang berdaulat, tentu saja Jepang menyadari bahwa potensi ancaman tidak hanya berasal dari negara lain, melainkan juga dapat berasal dari aktor non-negara. Oleh karena itu, dalam pidatonya, Shinzo Abe berusaha untuk menjelaskan kepada dunia bahwa mereka hanya akan mengubah interpretasi Pasal 9 menjadi Jepang akan mengerahkan militernya jika sekutu dalam keadaan terancam (Friedman dalam Damartyas, 2018).

## **2.5 Jepang dan Perang**

Perang Dunia II (1939-1945) merupakan konfrontasi antara ‘Kekuatan Poros’ yang terdiri dari negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang, dengan ‘Kekuatan Sekutu’ yang berpusat di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet. Kala itu, depresi dunia yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1929 akibat penurunan ekonomi secara global, memicu konfrontasi internasional yang sengit. Agar negara ‘Kekuatan Sekutu’ dapat bertahan hidup, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara lainnya memiliki hubungan dekat dengan wilayah yang memiliki hubungan mendalam dengan negara mereka sendiri untuk bekerja sama dan berdagang dengan negara lain. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang mencoba memperluas kekuasaannya ke luar negeri dengan menggunakan kekuatan militer untuk bertahan hidup (Amelia, 2020). Negara-negara tersebut



melakukan politik berdasarkan gagasan untuk mengizinkan warganya melayani negara, bahkan jika menekan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Dalam halnya melayani negara, tentara muda Jepang didorong oleh atasan mereka untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan maksimum pada masing-masing tawanan perang sebagai cara untuk memperkuat diri mereka sendiri dalam pertempuran di masa depan, dan juga untuk memberantas gagasan belas kasih yang beradab. Tidak ada kemuliaan bagi tentara Jepang kecuali mengabdikan kepada Kaisar. Nilai terbesar dari kehidupan para tentara Jepang adalah membawa kemenangan dan rampasan perang dari negara jajahan. Sebaliknya, tidak ada kehinaan yang lebih buruk selain tertangkap sebagai tawanan pihak musuh, lebih baik bunuh diri daripada menjadi tawanan perang (Chen, 2001). Oleh sebab itu, tentara Jepang selama perang telah banyak melakukan tindakan tidak manusiawi saat menjajah atau menyerang negara-negara asing, terutama negara-negara yang menjadi tujuan ekspansi dan imperialisme Jepang. Berikut merupakan beberapa peristiwa keterlibatan Jepang dalam perang yang tercermin pada puisi *Hiroshima to Iu Toki* dan puisi *Nan no Tame ni Tatakatta no ka* karya Sadako Kurihara.

### **1. *The Rape of Nanjing***

Dalam rangkaian agresi militer Jepang terhadap China sejak tahun 1931, Jepang berhasil menguasai kota-kota besar di China seperti Chungking, Peking, dan Shanghai. Setelah kemenangan berdarah di Shanghai selama perang Sino-Jepang II (November 1937), pada 13 Desember 1937, pasukan tentara Jepang yang dikomandoi oleh Jenderal Matsui Iwane, memasuki ibu kota Tiongkok, Nanjing untuk melancarkan serangan secara brutal membantai tentara dan warga sipil. Bahkan, sebelum kedatangan para pasukan tentara Jepang, sudah tersebar berita mengenai berbagai kekejaman yang telah dilakukan tentara Jepang dalam perjalanan mereka menuju China, terutama pembunuhan dan penjarahan. Di kota Nanjing, tindakan pembunuhan acak sering terjadi ketika tentara Jepang menembakkan senapan mereka ke kerumunan warga sipil yang panik, membunuh tanpa pandang bulu. Tentara Jepang juga menjarah pertokoan dengan membunuh para pemilik toko, lalu membakar gedung-gedung toko setelah mengunci orang-orang dari segala usia yang ditangkap oleh tentara Jepang di dalam gedung tersebut.

Mereka sangat menikmati penderitaan luar biasa yang terjadi ketika orang-orang di dalam gedung berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari kobaran api dengan naik ke atap gedung dan melompat ke jalan. Pembantaian yang luar biasa, pembakaran di seluruh kota, pencurian, penghancuran properti besar-besaran, dan pemerkosaan terus berlanjut selama sekitar enam minggu, terhitung dari pertengahan Desember 1937 hingga awal Februari 1938.

Rekaman yang difilmkan dan foto yang diambil oleh Jepang sendiri mendokumentasikan kebrutalan tersebut, seperti tentara Jepang yang terlihat tersenyum saat melakukan latihan bayonet pada tawanan perang yang masih hidup, memenggal kepala para tawanan dan menjadikan kepala para tawanan yang terputus sebagai souvenir, dan dengan bangganya berdiri di antara mayat-mayat yang dimutilasi. Setelah kematian tawanan perang, para tentara Jepang mengalihkan perhatian mereka kepada para wanita Nanjing. Wanita tua di atas usia 70 tahun serta gadis kecil di bawah usia 8 tahun diseret untuk dilecehkan secara seksual. Para wanita tersebut diperkosa secara berkelompok oleh tentara Jepang, kemudian ditikam hingga mati dengan bayonet atau ditembak, sehingga mereka tidak pernah bisa menjadi saksi. Wanita hamil pun tidak luput dari kebiadaban tentara Jepang. Dalam beberapa kasus, mereka diperkosa, kemudian perut mereka digorok terbuka yang mengakibatkan janin-janinnya robek. Terkadang pula, tentara Jepang menyerbu ke beberapa rumah penduduk Nanjing, dan memaksa kepala keluarga laki-laki untuk memperkosa putri mereka sendiri, putra untuk memperkosa ibu mereka sendiri, dan saudara laki-laki untuk memperkosa saudara perempuan mereka sendiri. Selain itu, tentara Jepang juga menerapkan sistem *Military Comfort Women* yang dalam bahasa Jepang adalah *Jukun Ianfu*, yakni perbudakan wanita untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual para tentara militer Jepang. Para wanita muda Nanjing dipaksa menjadi budak pelacur yang semata-mata disediakan bagi kesenangan seksual tentara Jepang. Sementara itu, penduduk Nanjing yang tidak terbunuh di tempat, dibawa ke pinggiran kota oleh tentara Jepang, dan dipaksa menggali kuburan mereka sendiri untuk mengubur satu sama lain hidup-hidup di tanah (Gavin, 2000)

Muda atau tua, pria atau wanita, siapa pun tidak dapat terbebas dari perlakuan biadab tentara Jepang dengan alasan apa pun. Mayat dapat ditemukan di mana-mana di seluruh kota. Jalan-jalan di kota Nanjing dikatakan benar-benar berwarna merah dengan darah. Tidak ada angka yang resmi mengenai jumlah orang yang terluka, terbunuh, dan diperkosa dalam tragedi pembantaian Nanjing, sebab sebagian besar catatan militer Jepang pada pembunuhan sengaja dirahasiakan. Meskipun, penyelidikan pascaperang yang dituntaskan oleh Pengadilan Distrik Nanjing pada April 1946, menyatakan jumlah korban tewas mencapai 295.525 orang. Terhitung sebanyak 76 persen korban adalah laki-laki, 22 persen korban adalah perempuan, dan 2 persen korban adalah anak-anak (Brook, 1999). Peristiwa mengerikan tersebut dikenal sebagai *the Nanjing Massacre* atau *the Rape of Nanjing* karena sekitar 20.000 – 80.000 wanita diserang secara seksual, dan mewakili kekejaman terburuk yang dilakukan tentara Jepang selama perang.

## **2. Penyerangan Pearl Harbour**

Pearl Harbour merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terletak di Hawaii, Samudra Pasifik, sekitar 2.000 mil dari daratan Amerika Serikat dan sekitar 4.000 mil dari Jepang. Penyerangan Pearl Harbour oleh Angkatan Laut dan Udara Jepang berawal dari ketidaksenangan pihak Amerika Serikat dengan sikap Jepang yang semakin agresif dalam perang terhadap China, sementara pemerintah Jepang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan demografisnya adalah dengan melakukan ekspansi ke wilayah tetangga dan mengambil alih pasar impornya. Atas tujuan ini, Jepang menyatakan perang terhadap China pada tahun 1937, yang dikenal sebagai peristiwa *The Rape of Nanjing*. Hal ini kemudian memicu tanggapan dari para pemimpin Amerika Serikat terkait agresi yang dilakukan Jepang terhadap China dengan serangkaian sanksi ekonomi dan embargo perdagangan, Amerika Serikat beralasan bahwa tanpa akses uang dan barang, dan terutama pasokan penting seperti minyak, Jepang harus mengendalikan ekspansionismenya. Sebaliknya, sanksi tersebut malah membuat Jepang lebih bertekad untuk terus melakukan ekspansinya hingga ke wilayah Asia Tenggara dan Pasifik (Danforth, 2015).

Jepang berencana untuk menghancurkan Armada Pasifik Amerika Serikat, dengan begitu, Amerika Serikat tidak akan mampu melawan karena angkatan bersenjata Jepang telah menyebar ke seluruh Pasifik. Pearl Harbour menjadi lokasi serangan mendadak yang dilakukan oleh pasukan tentara Jepang pada 7 Desember 1941. Tepat pada hari Minggu sebelum pukul 8 pagi, ratusan pesawat tempur Jepang memenuhi langit Pearl Harbour, di mana mereka menghujani bom dan peluru yang berhasil menghancurkan hampir 20 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, dan lebih dari 300 pesawat terbang. Dermaga dan lapangan terbang pun hancur. Lebih dari 2.403 pelaut, tentara, dan termasuk warga sipil tewas dalam serangan itu, dan 1.000 orang lainnya terluka. Namun, Jepang tidak seratus persen telah berhasil melumpuhkan Armada Pasifik Amerika Serikat, sebab bagi Amerika Serikat, kapal perang bukan lagi kapal Angkatan Laut yang paling penting dikarenakan Amerika Serikat masih memiliki kapal induk yang diletakkan jauh dari Pearl Harbour. Selain itu, depot penyimpanan minyak, bengkel, galangan kapal, dan dermaga kapal selam Amerika Serikat masih tetap utuh. Hal ini yang mengakibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat mampu pulih dengan relatif cepat setelah serangan di Pearl Harbour kala itu.

Sehari setelah serangan dahsyat di Pearl Harbour, Presiden Franklin D. Roosevelt berpidato dalam sesi gabungan Kongres Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa pada 7 Desember 1941, akan menjadi tanggal yang hidup dalam keburukan karena Amerika Serikat secara tiba-tiba dan sengaja diserang oleh Angkatan Laut dan Udara Kekaisaran Jepang. Maka dari itu, Amerika Serikat akan menyatakan perang dengan Jepang. Akhirnya, pada 8 Desember 1941, Kongres menyetujui deklarasi perang Amerika Serikat terhadap Jepang, dan serangan mendadak Jepang di Pearl Harbour akan menjadi pendorong Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Dunia II, konflik yang akan berakhir dengan penyerahan Jepang setelah pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai serangan balasan terhadap Jepang (Palmieri, 2009).

Sebelum menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, militer Amerika Serikat lebih dahulu menyerang kota Kure, Jepang. Ketika masa Perang Dunia II, Angkatan Laut Jepang adalah yang terbesar dan modern di kawasan Asia

Pasifik. Basisnya adalah kota Kure. Di mana kota Kure berfungsi sebagai kota pelabuhan militer dan markas besar Distrik Angkatan Laut Kure yang terletak di bagian barat daya Prefektur Hiroshima. Pada Juli 1945, kota Kure dibom oleh pesawat B-29 milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang telah membakar sebagian besar kota metropolitan Jepang, mulai dari serangan udara di kota-kota kecil dan menengah pada pertengahan bulan Juni. Setelah bom itu dijatuhkan, sekitar 337 hektar tanah terbakar dan 125.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hampir seluruh kota Kure berubah menjadi lautan api, dan menewaskan sekitar 1.900 orang (Takeuchi, 1977).

Selanjutnya, bom atom dijatuhkan di Hiroshima oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8.15 pagi. Penduduk Hiroshima yang tidak berdaya tiba-tiba disambar oleh sinar panas yang diperkirakan berada pada suhu 3.000 – 4.000 derajat celsius, dengan kecepatan ledakan bom 440 meter per detik yang menyebabkan api segera menyebar setelah pengeboman dan menimbulkan kadar radiasi yang sangat besar (Nagai, 2022:272). Sinar panas yang kuat langsung mengubah penduduk Hiroshima menjadi tulang dan abu dalam sekejap. Pada saat pemboman, Hiroshima adalah rumah bagi 280.000 – 290.000 warga sipil, serta 43.000 tentara. Diperkirakan sekitar 78.000 orang meninggal akibat ledakan bom atom, dan 51.000 orang lainnya terluka atau hilang. Sekitar 48.000 dari 76.000 bangunan di Hiroshima rata dengan tanah dan 22.000 bangunan rusak parah. Mayat-mayat dibakar dan dimakamkan di berbagai tempat kota; beberapa tidak ditemukan, dan yang lainnya dimakamkan di kuburan massal tanpa identifikasi. Akibat pemboman ini, Kaisar Hirohito mengaku kalah atas Amerika Serikat dan mengumumkan penyerahan negaranya dalam siaran radio pada 15 Agustus 1945. Perjanjian penyerahan resmi Jepang ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika Serikat Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo (Brown, 1995).

### **3. *The Manila Massacre***

Pertempuran Manila (3 Februari – 3 Maret 1945) merupakan perang kota yang terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang. Pertempuran ini mengubah rencana pembebasan kota dan penduduknya dari tirani Jepang menjadi pembantaian besar-

besar terhadap warga sipil dan kehancuran total di pusat kota. Beberapa jam setelah penyerangan Pearl Harbour pada 7 Desember 1941, tentara kekaisaran Jepang mengebom kota-kota di Filipina seperti Baguio, Davao, dan daerah lain di Filipina di bawah pemerintahan kolonial Amerika Serikat. Saat itu, Jenderal Douglas MacArthur yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat dan marsekal lapangan Angkatan Darat Filipina, bertanggung jawab atas pertahanan Filipina yang menyatakan Manila sebagai kota terbuka pada 26 Desember 1941, dalam upaya untuk menghindari kota Manila dan penduduknya terseret dalam kekacauan perang. Kemudian, pada Maret 1942, Invasi Jepang ke Filipina telah memaksa MacArthur untuk menarik pasukannya ke wilayah Corregidor dan Bataan, yang menyebabkan pasukan tentara Jepang dapat memasuki Manila tanpa diganggu oleh pasukan Amerika (Nagai, 2022:273).

Invasi Jepang ke Manila merupakan salah satu dari beberapa kejahatan perang besar yang dilakukan oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Informasi mengenai kekejaman Jepang selama pertempuran Manila telah terdengar sampai ke otoritas militer Amerika Serikat. Jenderal Douglas MacArthur segera memerintahkan pengumpulan informasi mengenai pembantaian yang telah dilakukan tentara Jepang. Berdasarkan perintah ini, pasukan sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya menyusun laporan kehancuran Manila dan kekejaman Jepang, untuk dikirimkan ke Departemen Angkatan Darat Amerika Serikat pada Maret 1945 (Scott, 2019). Laporan investigasi mengenai kejahatan perang yang dilakukan tentara Jepang selama pertempuran Manila termasuk yang paling akurat di antara semua laporan investigasi kejahatan perang selama Perang Dunia II, sejauh menyangkut pembentukan fakta dari perspektif para korban. Pasukan tentara Jepang melakukan pembantaian tanpa pandang bulu kepada lebih dari 100.000 warga sipil Manila, dan terutama membunuh mantan polisi, petugas polisi, bahkan beberapa pendeta yang dicurigai setia kepada Amerika Serikat. Marinir Jepang menyerbu markas palang merah untuk melakukan penembakan dan bayonet terhadap lebih dari 50 warga sipil, termasuk bayi. Para pasien diikat ke tempat tidur mereka, mayat laki-laki dimutilasi, perempuan dari segala usia diperkosa sebelum mereka dibunuh, dan bola mata bayi dicungkil lalu dioleskan ke dinding seperti jeli. Kemudian, tentara Jepang

mengepung sebuah Klub Jerman yang berada di sebuah aula sosial yang besar, tempat lebih dari 500 warga sipil berkumpul di ruangan tersebut untuk berlindung dari serangan tentara Jepang. Tentara Jepang menyiram seluruh furnitur klub dengan bensin dan membakarnya. Warga sipil laki-laki yang merangkak keluar untuk melarikan diri dari ruangan, langsung ditembak oleh tentara Jepang. Sedangkan, warga sipil wanita yang melarikan diri mendapat nasib yang lebih buruk. Tentara Jepang menangkap para wanita tersebut, kemudian menuangkan bensin ke kepala mereka dan membakar rambut mereka. Kekejaman tentara Jepang di Manila tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga mengumpulkan ratusan wanita dan mengunci mereka di dalam hotel Bayview selama berhari-hari, kemudian memperkosa para wanita tersebut sebanyak 12 hingga 15 kali dalam satu malam. Setelah perbuatan biadab tersebut dilakukan, tentara Jepang mengiris puting payudara para wanita tersebut, dan membayonet tubuh mereka dari leher hingga ke kaki (Orendain, 2014). Peristiwa berdarah yang disebabkan oleh kekejaman tentara kekaisaran Jepang terhadap warga sipil selama pertempuran Manila, kemudian dikenal sebagai *The Manila Massacre*.

#### **4. Perang Teluk II**

Perang Teluk II dimulai dengan konflik internasional yang dipicu oleh invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988. Tujuan invasi Irak ke Kuwait adalah untuk memperoleh cadangan minyak skala besar negara itu. Pada 6 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB meminta Irak untuk menarik diri dari Kuwait dan memberlakukan embargo perdagangan global ke Irak. Dewan Keamanan PBB mengizinkan penggunaan kekuatan terhadap Irak jika tidak menarik diri dari Kuwait pada 15 Januari 1991. Pada perkembangannya, Perang Teluk II menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat dalam mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat menyerukan penarikan Irak dari Kuwait yang memicu pengorganisasian pasukan multinasional yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat. Sebanyak 500.000 tentara Amerika Serikat memastikan efektivitas resolusi Dewan Keamanan PBB atas sanksi ekonomi terhadap Irak. Tetapi, Saddam Hussein (pemimpin Irak)

dengan keras kepala menolak untuk menarik pasukan dari Kuwait, yang menyebabkan pasukan multinasional melancarkan serangan udara terhadap Irak pada 17 Januari 1991 (Sakun, 2021).

Dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan penggunaan kekuatan sebagai perisai, Jepang dituntut untuk secara tegas mendukung penggunaan kekuatan, mengingat komitmen kebijakan luar negeri Jepang yang berpusat pada PBB maupun realitas aliansi militernya dengan Amerika Serikat. Secara hakiki, jelas bahwa hanya ada sedikit ruang bagi Jepang pada saat itu untuk berkontribusi secara militer, sebab *Japan Self Defense Force* (JSDF) tidak pernah meninggalkan Jepang untuk misi di luar negeri, dan kurangnya ketentuan hukum maupun pelatihan militer yang diperlukan. Maka dari itu, kontribusi terbesar yang dapat diberikan Jepang untuk koalisi melawan Irak adalah dalam bantuan keuangan dan materi. Pada 29 Agustus 1990, mulanya Jepang mengumumkan akan menyumbangkan dana koalisi sebesar 10 juta dolar. Tetapi, Kementerian Keuangan Jepang kemudian menambah jumlah pendanaan lebih lanjut yang pada akhirnya menghasilkan total 13 miliar dolar. Penambahan dana yang dilakukan Jepang didasari atas ketidaksenangan pihak Amerika Serikat yang memandang Jepang sebagai negara yang egois yang tidak banyak berkontribusi pada upaya internasional.

Selanjutnya, pada bulan April 1991, setelah berakhirnya Perang Teluk II (28 Februari 1991), satu skuadron kapal perang Angkatan Laut Jepang berlayar untuk meluncurkan misi militer pertama negara di luar negeri sambil mengibarkan bendera Matahari Terbit. Kapal penyapu ranjau Jepang berangkat menuju Teluk Persia dan bergabung dengan Angkatan Laut multinasional dalam membersihkan ranjau yang diletakkan oleh Irak selama Perang Teluk. Di Teluk, Jepang bergabung dengan kapal Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Arab Saudi, Perancis, dan Belgia untuk menemukan dan menghancurkan sekitar 700 ranjau Irak di jalur pelayaran. Tetapi, tidak dapat disangkal bahwa Jepang mendapat nilai buruk dari masyarakat internasional atas kontribusinya dalam Perang Teluk II, dan akibatnya martabat diplomasi Jepang merosot (Reid, 1991).



**Tabel 1 Keterlibatan Jepang dalam Perang**

No.	Jepang dan Perang	Periode Waktu	Keterangan
1	<i>The Rape of Nanjing</i>	13 Desember 1937 – Februari 1938	Bagian dari perang Sino-Jepang II
2	Penyerangan Pearl Harbour	7 Desember 1941	Pemicu Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II
3	<i>The Manila Massacre</i>	3 Februari – 3 Maret 1945	Bagian dari Perang Dunia II
4	Perang Teluk II	2 Agustus 1990 – 28 Februari 1991	Jepang membantu Amerika Serikat

## 2.6 Biografi Penyair

Sadako Kurihara merupakan seorang esais dan penyair wanita Jepang yang lahir pada tanggal 4 Maret 1913 di Hiroshima. Kurihara mulai menulis *tanka* dan puisi pada tahun 1930-an. Sebelum peristiwa pemboman Hiroshima, di bawah pengaruh suaminya (Tadaichi), Kurihara terlibat dalam gerakan anarkis. Kurihara membantu pembentukan Federasi Anarkis Jepang pada bulan Mei 1946, dan dengan pengaruh ide anarkistik, Kurihara menulis puisi-puisi yang memprotes politik Jepang selama perang. Banyak dari karya-karya sebelumnya yang diterbitkan setelah perang dalam kumpulan puisi pertamanya yang berjudul *Kuroi Tamago* (1946). *Kuroi Tamago* merupakan puisi metaforis tentang dirinya sebagai seekor burung yang terkunci dalam kulit telur hitam keras yang menunggu untuk menetas dan menjadi seekor burung yang cantik. Andoh (dalam Styezec, 2010:108) menafsirkan bahwa kata *Kuroi* yang berarti ‘hitam’ memiliki makna warna simbolis anarkisme, dan kata *Tamago* yang berarti ‘telur’ diibaratkan sebagai Kurihara yang ingin melepaskan diri dari ikatan erat, untuk menjadi bebas, untuk melebarkan sayapnya. Kurihara ingin bebas dalam mengekspresikan ide-ide anarkisnya atau ide-ide tentang kebebasan dunia. Inilah alasan mengapa Kurihara menamai kumpulan puisi pertamanya dengan judul *Kuroi Tamago*.

Kurihara merupakan seorang pengamat yang tajam dan komentator politik pada masanya. Kurihara secara terbuka mengkritik Pemerintah Jepang yang tidak mengungkapkan seluruh kebenaran tentang perang (Styezec, 2010:113). Setelah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki, tema puisi-puisi Kurihara berubah menjadi seruan akan perdamaian. Dalam puisi berjudul *Hiroshima to Iu Toki* yang ditulis pada tahun 1965, Sadako Kurihara menuntut orang-orang untuk mengingat seluk-beluk perang, tetapi tidak hanya yang dilakukan terhadap Jepang, melainkan yang telah dilakukan oleh tentara Jepang di negara-negara Asia. Kurihara tidak takut untuk menarik perhatian pada kesalahan dan kekejaman Jepang di Asia selama perang. Selain itu, dalam puisinya yang berjudul *Nan no Tame ni Tatakatta no ka* yang ditulis pada tahun 1991, Kurihara mengecam tindakan pemerintah Jepang yang kembali terlibat dalam peperangan meski Konstitusi Jepang Pasal 9 telah ditetapkan, sebab hal ini tidak sesuai dengan isi dari Pasal 9.

